

BAB IV

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Dalam proses pembangunan, setiap kabupaten/kota akan dihadapkan kepada beberapa isu strategis dengan intensitas yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh kekuatan dan peluang serta prospek pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Pacitan memiliki banyak potensi daerah, namun demikian terdapat beberapa permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis yang akan mewarnai pembangunan Kabupaten Pacitan selama 5 (lima) tahun kedepan.

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Pembangunan Daerah

Sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Pacitan dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah periode 5 (lima) tahun berkenaan (RPJMD). RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 saat ini merupakan periode ketiga dari RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025. Suatu program pembangunan daerah harus menjabarkan dengan baik sasaran-sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD serta tujuan dan sasaran dari visi dan misi rencana pembangunan 5 (lima) tahun. Dengan demikian, diperlukan identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah untuk menjabarkan pencapaian sasaran pokok sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD dan mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Hasil identifikasi tersebut disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Perumusan Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025

Sasaran RPJPD	Indikator Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya.	1. Terwujudnya karakter masyarakat Pacitan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia dan bermoral yang menjunjung nilai-nilai agama dan budaya yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat Pacitan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berkembang dinamis dan berorientasi iptek. 2. Semakin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat masyarakat Pacitan, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa. 3. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	1. Tingginya Angka Kemiskinan 2. Tingginya Angka Pengangguran 3. Belum Optimalnya Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam. 4. Rendahnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. 5. Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Fasilitas dan Pelayanan Publik.
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata	1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain, dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin. 2. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas, kelautan dan pariwisata yang menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri yang berdaya saing serta meningkatnya peranan sektor jasa.	6. Kurang Memadainya Kondisi Infrastruktur. 7. Masih Terbatasnya Akses Masyarakat Terhadap Air Bersih. 8. Terdapatnya Kawasan Rawan Bencana Alam.
3. Terwujudnya Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil,	1. Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi, terpenuhinya pasokan energi sesuai dengan kebutuhan dan terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. 2. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. 3. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 4. Terwujudnya ruang wilayah Pacitan sebagai Kabupaten yang mandiri, berdaya saing, aman, sejahtera.	
4. Terwujudnya Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya	1. Terwujudnya keamanan daerah yang menjamin martabat kemanusiaan dan keselamatan masyarakat dari gangguan keamanan baik dari luar daerah maupun dalam daerah. 2. Terciptanya supremasi dan penegakan hukum tanpa memandang kedudukan,	

Sasaran RPJPD	Indikator Target RPJPD	Permasalahan Pembangunan Daerah
	<p>pangkat dan jabatan dan terciptanya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.</p> <p>3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik.</p> <p>4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan.</p>	
5. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	<p>1. Semakin baiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihan lingkungan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi.</p> <p>2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing serta modal pembangunan daerah.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.</p>	
6. Terwujudnya Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>	<p>1. Meningkatnya profesionalisme birokrasi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dan bertanggungjawab serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah.</p> <p>2. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan yang dapat diukur dengan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.</p> <p>3. Terwujudnya ketertiban sosial melalui penegakan hukum yang adil, konsisten, konsekwen, aspiratif, dan tidak diskriminatif.</p> <p>4. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah yang mantap sehingga mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>).</p> <p>5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penentuan kebijakan publik, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah.</p>	

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Untuk Pemenuhan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Dalam membahas identifikasi permasalahan penentuan program pembangunan daerah ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menyelaraskan kondisi yang dihadapi saat ini dengan target atau indikator yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan sebelumnya. Berikut ini disajikan permasalahan pembangunan berdasarkan kondisi kinerja per urusan.

4.1.2.1. Pendidikan

Permasalahan yang terjadi juga adalah masih terdapatnya penduduk yang buta huruf, tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7,17% penduduk di atas umur 15 tahun yang masih buta huruf. Selain buta huruf, dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan juga masih sangat rendah. Hal ini ditunjukkan dengan masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan kurang memadai. Pada tahun 2015 untuk jenjang sekolah menengah pertama sebanyak 5,29% sekolah dalam kondisi bangunan rusak dan untuk jenjang sekolah menengah atas sebanyak 7,19% sekolah dalam kondisi bangunan rusak. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan, karena keberadaan fasilitas akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif.

Masalah lainnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan tingkat atas, hal ini terlihat pada tahun 2015 angka melanjutkan untuk jenjang SMA/SMK/MA mencapai 80,22% atau sebanyak 19,78% anak yang lulus SMP/MTS tidak melanjutkan.

Berkaitan dengan tenaga pengajar di Kabupaten Pacitan juga masih perlu ditingkatkan lagi kualitas guru yang ada dimana masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV tercatat pada tahun 2015 untuk jenjang sekolah dasar masih terdapat sebanyak 12,22% yang belum memenuhi kualifikasi, untuk jenjang SMP sebanyak 4,49% dan untuk jenjang pendidikan SMA sebanyak 1,08% yang belum memenuhi kualifikasi.

4.1.2.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dan hak dasar bagi setiap masyarakat, hal tersebut juga akan bermuara kepada kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas kesehatan maka diharapkan secara langsung akan meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

1. Sebagian masyarakat golongan menengah ke atas lebih percaya berobat di luar Kabupaten Pacitan;
2. Tenaga medis dan paramedis masih kurang, hal ini disebabkan oleh banyaknya tenaga medis yang sudah pensiun, namun sampai sekarang belum ada penggantinya;
3. Masih adanya sarana dan prasarana kesehatan yang belum sesuai standart;

4. Cakupan rumah tangga yang melaksanakan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) masih rendah;
5. Pelaksanaan 5 pilar STBM (sanitasi total berbasis masyarakat) belum optimal;
6. Angka kesakitan penyakit menular serta meningkatnya kasus penyakit yang tidak menular masih tinggi;
7. Kasus gizi buruk pada kelompok rentan di masyarakat;
8. Angka kematian ibu dan bayi masih terjadi.

4.1.2.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan utama yang sedang dihadapi adalah masih terdapatnya jalan dan jembatan dengan kondisi belum mantap, tercatat pada tahun 2015 jalan dengan kondisi belum mantap masih sangat tinggi yakni sebesar 43,85% dan jembatan sebesar 7,19%. Jaringan irigasi di Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 masih terdapat kondisi kurang baik sebesar 43,92%. Permasalahan lain yang sedang dihadapi adalah masih terdapatnya penduduk yang belum memiliki akses air bersih. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi aksesibilitas air bersih pada tahun 2015 sebesar 50,05%.

Terkait tata ruang, permasalahannya adalah masih minimnya dokumen tata ruang yang dapat digunakan sebagai dasar arahan pemanfaatan ruang. Untuk saat ini baru ada dokumen RTRW dan belum memiliki dokumen RDTR yang sudah dilegalisasi.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam tata ruang sebagai berikut:

1. Pesatnya pembangunan yang memberi pengaruh terhadap alih fungsi lahan;
2. Penanganan infrastruktur wilayah yang belum terpadu secara keruangan;
3. Mitigasi bencana kedalam perencanaan tata ruang belum optimal;
4. Peran kawasan strategis di Kabupaten Pacitan belum optimal;
5. Pengembangan wilayah antara kawasan perkotaan dan perdesaan belum terpadu dan sinergis.

4.1.2.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah masih terdapatnya rumah tinggal yang belum terlayani MCK, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 12,44%. Selain itu di Kabupaten Pacitan juga masih terdapat rumah yang tidak layak huni sejumlah 3.472 unit dan diperkirakan masih ada penambahan. Selain itu di wilayah perkotaan masih terdapat drainase/pembuangan aliran air yang masih kurang baik, tercatat pada tahun 2015 masih terdapat 19,46% drainase yang kondisinya kurang baik.

4.1.2.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang sedang dihadapi pada aspek ketentraman dan ketertiban yaitu:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
2. Jumlah personil Satpol PP yang kurang memadai (jumlah dan kualitas) mengakibatkan penanganan Peraturan Daerah tidak optimal;

3. Kurang memadainya sarana dan prasarana, kondisi saat ini belum memiliki ruangan untuk menyimpan barang sitaan;
4. Masih rendahnya kesadaran pihak swasta untuk melakukan perizinan;
5. Ketidaksesuaian izin dari para pelaku usaha. Kondisi yang ada sekarang pelaku usaha mengajukan izin restoran, namun digunakan untuk hiburan dll.;
6. Masih belum terdapat Satuan Linmas untuk daerah-daerah wisata.

4.1.2.6. Sosial

Permasalahan di bidang sosial yang terjadi di Kabupaten Pacitan antara lain kurangnya fasilitas pelayanan PMKS, kurangnya SDM tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan kampung siaga bencana, kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana, masih rendahnya jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

4.1.2.7. Tenaga Kerja

Pada urusan ketenagakerjaan, permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pacitan adalah angka partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2014 masih mencapai 68,85%. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat juga tingkat pengangguran terbuka yang terjadi, pada tahun 2014 mencapai 1,08%.

Selain itu, permasalahan lain yang juga dihadapi terkait ketenagakerjaan yaitu masih rendahnya kualitas dan produktifitas angkatan kerja. Hal ini menyebabkan tenaga kerja yang ada memiliki akses yang sangat terbatas untuk memenuhi atau mengisi kebutuhan yang diinginkan lapangan kerja. Lebih lanjut, dengan kualitas tenaga kerja yang terbatas menyebabkan daya saing tenaga kerja tidak optimal.

4.1.2.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selanjutnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak, beberapa permasalahan di Kabupaten Pacitan adalah masih tingginya angka tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, meskipun sampai dengan tahun 2015 telah ditangani 100% dari seluruh kasus, akan tetapi *trend* tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak cenderung meningkat.

4.1.2.9. Pangan

Dalam bidang ketahanan pangan, masalah yang sedang dihadapi saat ini adalah semakin menurunnya ketersediaan jumlah pangan utama. Tercatat pada tahun 2015 hanya terdapat 194,55 (Kg/jiwa). Jumlah ini sangat jauh dibandingkan dengan tahun 2013 yang mencapai 204,52 (Kg/jiwa).

4.1.2.10. Pertanian

Dalam bidang pertanian, permasalahan yang terjadi adalah masih tingginya kasus perselisihan tanah yang terjadi, pada tahun 2015 tercatat terdapat 80 kasus perselisihan tanah yang terjadi.

Meskipun demikian seluruh kasus tersebut dapat ditangani seluruhnya dengan baik. Masih rendahnya kepastian hukum kepemilikan tanah di masyarakat yang memiliki lahan.

4.1.2.11. Lingkungan Hidup

Dalam urusan lingkungan hidup, permasalahan persampahan pada tahun 2015 masih terdapat 9,65% yang belum terlayani.

4.1.2.12. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang terjadi adalah masih terdapatnya penduduk 17 tahun yang belum memiliki KTP. Berdasarkan data yang ada, tercatat pada tahun 2015 terdapat 10,27% penduduk yang belum memiliki KTP. Begitupun dengan kepemilikan akta kelahiran, pada tahun 2015 masih terdapat 19,91% anak yang lahir dan belum memiliki akta lahir. Selain itu permasalahan lainnya yang dihadapi adalah:

1. Kondisi geografis yang menghambat warga untuk mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil;
2. Tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih kurang;
3. Kurangnya sarana dan prasarana layanan dokumen kependudukan dan catatan sipil (KIA-Kartu Identitas Anak).

4.1.2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan desa juga masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Diperlukan penguatan kelembagaan pasca berakhirnya PNPM-MPd untuk memelihara dan melestarikan asset yang dimiliki PNPM-MPd utamanya dana bergulir (SPP);
2. Peran lembaga LPMD belum maksimal;
3. Peran KPM belum optimal di desa;
4. Belum memfungsikan LPMD dalam perencanaan pembangunan di desa;
5. KPM belum diberdayakan;
6. Kurangnya pemahaman peran Pokja Posyandu desa di wilayah Kecamatan dalam mengembangkan tugas fungsinya dalam pemberdayaan masyarakat akan pentingnya posyandu serta pengurus Pokja Posyandu belum berfungsi secara optimal;
7. Kurang optimalnya peran pemerintah desa dan lembaga desa dalam mendukung program PMT-AS bagi anak sekolah.

4.1.2.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Pacitan antara lain:

1. Masih banyak pasangan usia subur yang memerlukan pelayanan kontrasepsi;
2. Masih rendahnya kepesertaan ber KB dan metode kontrasepsi jangka panjang;
3. Terbatasnya jadwal pelayanan *mobile*.

4.1.2.15. Perhubungan

Dalam urusan perhubungan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan adalah rendahnya kualitas angkutan umum yang belum memenuhi SPM, pada tahun 2015 baru terdaftar sebesar 42% angkutan yang melakukan uji kendaraan. Sedangkan kelengkapan alat uji pada unit pelayanan pengujian sampai dengan tahun 2015 baru tercapai 60%, sehingga belum memenuhi persyaratan akreditasi. Selain itu sarana dan prasarana keselamatan transportasi masih sangat minim, ditandai dengan baru terpenuhinya 29,12% dari total kebutuhan. Permasalahan perhubungan juga tidak lepas dari turunnya jumlah penumpang yang dapat terangkut angkutan umum. Penurunan jumlah penumpang disebabkan karena penduduk beralih memilih kendaraan pribadi karena kemudahan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan bermotor. Kondisi angkutan umum banyak yang rusak dan terbatas jumlahnya juga menjadi penyebab turunnya jumlah penumpang, sedangkan turunnya jumlah penumpang menyebabkan pendapatan angkutan umum tidak sebanding dengan biaya operasional.

4.1.2.16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang sedang dihadapi dalam bidang komunikasi dan informatika antara lain masih terdapat area *blank spot* yang sangat menghambat akses komunikasi ke wilayah tersebut. Selain itu infrastruktur komunikasi dan informatika yang ada di Kabupaten Pacitan pun masih belum memadai serta belum memadainya infrastruktur jaringan data, sedangkan pengelolaan data dan informasi sendiri masih bersifat parsial.

4.1.2.17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah masih banyaknya koperasi yang kurang aktif, kurangnya kemampuan administratif pengurus koperasi, penegakan marwah koperasi yang memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Permasalahan yang lain adalah masih rendahnya kemampuan wirausahawan dan masih kurangnya permodalan.

4.1.2.18. Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Pacitan masih menemui permasalahan yaitu masih rendahnya investor yang masuk ke wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1. Infrastruktur belum memadai untuk standar nasional;
2. Lahan datar yang tersedia tidak memenuhi luasan area kebutuhan investor;
3. Tidak tersedianya kawasan industri.

4.1.2.19. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang terjadi terkait pemuda dan olahraga adalah masih rendahnya jumlah organisasi pemuda yang ada saat ini. Tidak hanya itu, organisasi olahraga juga masih sangat rendah yakni pada tahun 2015 terdapat 23 organisasi pemuda dan 24 organisasi olahraga. Dengan rendahnya jumlah tersebut, maka akan berpengaruh terhadap rendahnya jumlah kegiatan kepemudaan dan olah raga yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 sebanyak 46 kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan. Jumlah ini hanya bertambah 5 kegiatan dari tahun sebelumnya sebanyak 41. Tidak hanya itu, jumlah kegiatan olahraga pun pada tahun 2015 mencapai 29 kegiatan, hanya bertambah 1 kegiatan dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 28 kegiatan.

4.1.2.20. Statistik

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang statistik adalah belum adanya koordinasi antar PD mengenai urusan statistik sektoral sehingga terjadi tumpang tindih/duplikasi kegiatan pendataan. Masing-masing PD belum mencantumkan program dan kegiatan statistik sektoral sesuai dengan uraian tugas, fungsi dan tata kerjanya. Belum adanya aturan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang mengatur pelaksanaan kegiatan statistik sektoral.

4.1.2.21. Kebudayaan

Dalam bidang kebudayaan khususnya berkaitan dengan sarana penyelenggaraan seni dan budaya masih sangat rendah. Tercatat sampai pada tahun 2015 hanya terdapat 30 sarana saja dan jumlah tersebut mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

4.1.2.22. Perpustakaan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang perpustakaan antara lain adalah:

1. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan (fasilitas ruang baca dewasa dan anak) serta prasarana pendukung;
2. Masih terbatasnya koleksi pustaka yang sesuai kebutuhan pemustaka;
3. Kurangnya tenaga pustakawan dan IT.

4.1.2.23. Kearsipan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kearsipan adalah kurangnya sarana prasarana dan SDM pengelola kearsipan.

4.1.2.24. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kabupaten Pacitan dalam bidang kelautan dan perikanan adalah:

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana bagi nelayan, pembudidaya serta pengolah perikanan;
2. Penurunan potensi sumber daya ikan;

3. Rendahnya permodalan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah;
4. Masih terjadinya pelanggaran alur pelayaran dan penggunaan alat terlarang dalam penangkapan ikan;
5. Rendahnya SDM nelayan, pembudidaya dan pengolah perikanan;
6. Rendahnya ketersediaan benih ikan;
7. Menurunnya ekosistem pesisir.

4.1.2.25. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Pacitan dalam urusan pariwisata antara lain:

1. Kebijakan kepariwisataan belum selaras antar sektor dan keruangan;
2. Sarana dan prasarana di daerah menuju tujuan wisata kurang memadai;
3. Jaringan promosi wisata masih kurang;
4. SDM kepariwisataan masih rendah.

4.1.2.26. Pertanian

Kabupaten Pacitan dalam bidang pertanian masih dihadapkan pada permasalahan yaitu semakin menurunnya produktivitas padi atau bahan pangan utama, tercatat pada tahun 2015 menghasilkan 160 ton, jumlah tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2014 yakni sebesar 210,23 ton.

4.1.2.27. Perdagangan

Permasalahan bidang perdagangan di Kabupaten Pacitan meliputi perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor dan standarisasi serta perlindungan konsumen.

4.1.2.28. Perindustrian

Perindustrian merupakan bidang yang mengedepankan adanya perkembangan dan perubahan ekonomi global yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di wilayah tertentu, sehingga harus dilakukan penataan secara rapi dari perencanaan pembangunan industri, perindustrian dan sistem informasi industri nasional.

4.2. Isu-Isu Strategis

4.2.1. Telaahan Isu/Kebijakan Internasional, Nasional dan Provinsi

Penentuan isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Pacitan dilakukan dengan pemetaan terlebih dahulu berkaitan dengan kebijakan pada tingkatan internasional, nasional maupun regional (provinsi). Pemetaan tersebut disajikan pada Tabel 4.2:

Tabel 4.2
Pemetaan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Isu/Kebijakan Internasional,
Nasional dan Provinsi

Internasional	Nasional (RPJMN 2015-2019)	Regional (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019)
<div>1. Lingkungan Hidup.</div> <div>2. Perkembangan Ekonomi.</div> <div>3. Perkembangan Teknologi Informasi.</div> <div>4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).</div>	<div>1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.</div> <div>2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.</div> <div>3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.</div> <div>4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.</div> <div>5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.</div> <div>6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.</div> <div>7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.</div> <div>8. Melakukan revolusi karakter bangsa.</div> <div>9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.</div>	<div>1. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Yang Berkeadilan.</div> <div>2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, Dan Berdaya Saing, Berbasis Agrobisnis/ Agroindustri, Dan Industrialisasi.</div> <div>3. Meningkatkan Pembangunan Yang Berkelanjutan, Dan Penataan Ruang. Meningkatkan Reformasi Birokrasi, Dan Pelayanan Publik.</div> <div>4. Meningkatkan Kualitas Kesalehan Sosial Dan Harmoni Sosial.</div>

Lebih lanjut uraian mengenai RPJMN 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 diuraikan sebagai berikut:

1. RPJMN 2015-2019

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Untuk mewujudkan visi ini ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

- 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Guna menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan 9 (sembilan) agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut **NAWA CITA**, sebagaimana telah disajikan pada Tabel 4.2 diatas. Strategi Pembangunan Nasional yang ditempuh untuk mewujudkan nawacita disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 4.1.
Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019



Kerangka pembangunan nasional jangka menengah yang disajikan diatas tentunya didukung dengan pembangunan daerah. Sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan daerah memegang peranan penting. Hal lain yang menjadi isu penting dalam menunjang pencapaian sebagian target nasional, yaitu mengenai *universal access* meliputi : akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) juga menjadi prioritas penanganan dalam RPJMD 2016-2021 ini.

Dalam Buku III RPJMN 2015-2019 disusun perencanaan pembangunan yang menggunakan pendekatan kewilayahan atau pulau. Berdasarkan hasil telaahan rencana pembangunan nasional untuk wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Pacitan, berikut ini disajikan beberapa arahan pembangunan yang berlokasi di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Pacitan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Jawa Timur.

1. Sasaran Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Jawa-Bali adalah mengurangi indeks risiko bencana pada 36 kabupaten/kota sasaran yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai PKN, PKSN, PKW, Kawasan Industri maupun pusat pertumbuhan lainnya, salah satunya adalah Kabupaten Pacitan. Adapun jenis bencana yang ada di Kabupaten Pacitan yaitu ancaman banjir dan tanah longsor;
2. Kegiatan strategis jangka menengah nasional di Provinsi Jawa Timur yang terkait sumber daya air salah satunya diprioritaskan untuk pembangunan Bendungan Wonodadi dan penyelesaian pembangunan Waduk Tukul di Pacitan.

2. RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019 ditetapkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014. RPJMD ini merupakan pedoman bagi pembangunan Provinsi Jawa Timur selama 5 (lima) tahun. Adapun visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014-2019 adalah: **"Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak"**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, ditempuh melalui lima misi yang diberi judul: "Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik".

Lima misi pembangunan Jawa Timur 2014-2019 yaitu:

1. Misi Pertama: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

2. Misi Kedua: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan Usaha Mikro dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri,

luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

3. Misi Ketiga: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang.

Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan.

4. Misi Keempat: Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan tata pemerintahan yang bersih (*clean government*), serta profesionalisme pelayanan publik.

5. Misi Kelima: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antar-umat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial, dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Untuk mewujudkan visi “Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak” melalui 5 (lima) misi dalam bingkai “Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik”, dilakukan berlandaskan 3 (tiga) strategi umum, yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat;
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin, yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment*;
3. Pengarusutamaan gender.

4.2.2. Telaahan Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar.

Perlunya suatu daerah menelaah RPJMD daerah lain karena alasan:

1. Adanya persamaan kepentingan atau tujuan atau upaya-upaya strategis yang harus disinergikan;
1. Adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama;
2. Adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama, utamanya daerah-daerah yang letaknya berdekatan; dan
3. Adanya kebijakan pemerintah menetapkan daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

Selanjutnya, identifikasi kebijakan dari dokumen RPJMD daerah lain dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Identifikasi RPJMD Daerah Lain

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi dan Misi
1	Kabupaten Trenggalek	2016-2021	<p>Visi: Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju, Adil, Sejahtera, Berkepribadian, Berlandaskan Iman Dan Taqwa.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional, demi pembangunan yang efektif dan efisien, serta pelayanan prima kepada masyarakat dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan.2. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian serta sektor produktif lain, melalui peningkatan produktivitas berbasis teknologi tepat guna dan akses terhadap sarana produksi, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata niaga yang adil dan menyejahterakan.3. Mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur transportasi dari skala regional hingga tingkat desa, infrastruktur pertanian, infrastruktur lain, termasuk yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan selatan Trenggalek.4. Meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik di sektor pertanian dan sektor produktif lain serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat.
2	Kabupaten Ponorogo	2016-2021	<p>Visi: mewujudkan Ponorogo yang lebih sejahtera, mandiri dan berdaya saing.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Membentuk Budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah, tanggap dan berkemampuan andal dalam memecahkan masalah.2. Mengelola sumber daya daerah menjadi lebih daya guna, unggul, produktif, berkelanjutan serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial melalui investasi, industri, perdagangan dan pengembangan pariwisata menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah.3. Mewujudkan pengelolaan instruktur strategis secara professional agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktifitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.4. Membangun Pertanian, sebagai pengembangan model berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh.5. Menata kawasan yang nyaman untuk semua, ketersediaan ruang publik yang memadai dan berwawasan lingkungan.6. Membangun prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa miskin, pengangguran serta perluasan kesempatan kerja, dan melindungi hak-hak masyarakat yang berlandaskan pada penegakkan hukum yang berkeadilan.7. Meningkatkan peran aktif Pemda dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas SDM yang handal, mempunyai kompetensi yang cukup, dan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan pemuda dan olahraga yang bertakwa, berbudaya

No	Daerah Lain	Periode RPJMD	Telaahan Visi dan Misi
			dan berkepribadian.
3	Kabupaten Gunung Kidul	2016-2021	<p>Visi: Mewujudkan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang professional.4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah.5. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah dan iklim investasi yang kondusif.6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4	Kabupaten Wonogiri	2016-2021	<p>Visi: Membangun Wonogiri Sukses, Beriman, Berbudaya, Berkeadilan, Berdaya Saing, dan Demokratis.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengelola pemerintahan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan demokratis terpercaya yang meliputi unsur manajemen keuangan, manajemen pelayanan dan manajemen hukum dan pengawasan dengan semboyan SUKSES sebagai pola managerial yang memiliki makna sebagaimana penjelasan singkat dalam Visi;2. Meningkatkan kualitas hidup manusia Wonogiri melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Wonogiri Pintar, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program Wonogiri Kerja Wonogiri Sejahtera, peningkatan kualitas kesehatan dengan program Wonogiri Sehat serta Wonogiri beriman sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing mengedepankan sikap toleransi antar umat;3. Membangun dan memberdayakan Wonogiri dari pinggiran dengan memperkuat prioritas pembangunan di desa;4. Meningkatkan produktifitas rakyat Wonogiri dan daya saing di segala bidang sehingga Wonogiri dapat maju dan bangkit bersama daerah-daerah lain;5. Mengembangkan dan melestarikan adat dan budaya serta tradisi di masyarakat Wonogiri;6. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan di segala bidang;7. Mengembangkan seluruh potensi-potensi didalam jiwa dan raganya Wonogiri untuk kemaslahatan rakyat Wonogiri.

Sumber: website masing-masing kabupaten.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa 4 (empat) kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Pacitan juga memiliki periodesasi RPJMD yang sama dengan Kabupaten Pacitan, yaitu 2016-2021. Dengan kondisi tersebut, maka keempat daerah tersebut juga bersamaan menyusun dokumen RPJMD 2016-2021, sehingga substansi yang diidentifikasi dari RPJMD adalah visi dan misi masing-masing daerah. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa visi dan misi tidak akan berubah, sedangkan

informasi lainnya di dalam RPJMD memiliki kemungkinan berubah dalam berbagai tahapan pembahasan rancangan RPJMD menuju Perda RPJMD.

6.2.1. Telaahan RPJPD Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025. Dokumen ini memuat pedoman pembangunan Kabupaten Pacitan dalam kurun waktu 20 tahun sampai dengan tahun 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Pacitan 2005–2025 adalah:

**“Kabupaten Pacitan Yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera
yang Menjunjung Nilai-Nilai Agama dan Budaya”**

Adapun Misi Kabupaten Pacitan 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya** dicapai dengan cara meningkatkan kualitas masyarakat Kabupaten Pacitan yang berdaya saing, berakhlak, berpendidikan, berdaya, inovatif dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. **Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata**, dicapai dengan cara peningkatan produksi pasca panen pada sektor industri pertanian, peningkatan hasil laut dan pengolahannya, serta menumbuh kembangkan pelayanan jasa pariwisata yang kompetitif dengan didukung antara lain oleh peningkatan peran Usaha Mikro dan usaha lainnya.
3. **Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktifitas Ekonomi yang Stabil** dicapai dengan cara pembangunan sarana dan prasarana daerah yang handal dan terintegrasi sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, meningkatkan investasi, menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
4. **Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya**, dicapai dengan cara peningkatan stabilitas politik, ketentraman dan ketertiban, konsistensi dalam penegakan hukum dan HAM, jaminan mengemukakan pendapat, berorganisasi, dan berpolitik serta terjaminnya keleluasaan segenap aktivitas kehidupan bermasyarakat yang bertanggung jawab.
5. **Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Berwawasan Lingkungan** dicapai dengan cara menyelenggarakan pembangunan ekonomi dengan tetap menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. **Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*** dicapai dengan cara membangun transparansi,

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kinerja pelayanan publik yang didukung profesionalisme aparatur.

Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan.

Saat ini pembangunan Kabupaten Pacitan memasuki tahap ketiga dari RPJPD. Untuk itu harus dilakukan telaah terhadap arah kebijakan tahap ketiga RPJPD. Pembangunan tahap III (2016–2021) diarahkan untuk **Pemantapan Kemandirian Masyarakat**. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Pacitan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun kehidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian, kelautan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya.

Adapun target setiap tahapan pencapaian indikator kinerja masing-masing misi disajikan pada uraian di bawah ini. Target indikator yang dimuat dalam RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 disajikan berdasarkan misi.

Tabel 4.4
Tahapan Pencapaian Indikator Kinerja Misi I

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
MISI I					
1	Angka melek huruf (%)	96,58	96,65	96,71	96,77
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS)				
	- APK PAUD	44	56	68	75
	- APK TK	45	56	67	80
	- APK SD/MI/PAKETA	103	103	103	103
	- APK SMP/MTs/PAKET B	97,4	98	99	100
	- APK SMA/SMK/MA/PAKET C	68	75	82	95
	- APM SD/MI/PAKET A	98,99	99	99,5	99,9
	- APM SMP/MTs/PAKET B	82	88	94	99,9
	- APM SMA/SMK/MA/PAKET C	54	64	76	90
3	Usia harapan hidup (tahun)	71,11	71,32	71,53	71,76
4	Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran)	< 4	< 4	< 4	< 4
5	Angka kematian bayi (per 100.000 kelahiran)	< 50	< 50	< 56	< 56
6	Jumlah PMKS (orang)	80.781	70.265	61.119	53.162
7	Laju pertumbuhan penduduk (%)	0,028	0,030	0,032	0,035
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	0,87	0,75	0,63	0,54
9	Produktivitas PDRB TK	12.420.273	39.632.860	126.467.719	403.556.134

No	Indikator Keberhasilan	Target Capaian			
		Tahap I (2006-2011)	Tahap II (2011-2016)	Tahap III (2016-2021)	Tahap IV (2021-2026)
10	Angka Kemiskinan (%)	18,20	14,25	10,5	6,75
MISI II					
1	PDRB Perkapita (Rp)	5.781.065,28	6.311.155,60	6.841.245,92	7.371.336,24
2	NTP	116,71	120,61	124,50	128,40
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,52	7,38	8,24	9,10
MISI III					
1	Kondisi Jalan (m)				
	- Baik	760.970	1.095.322	1.576.578	2.269.288
	- Sedang	232.672	334.902	482.050	693.850
	- Rusak	103.746	149.330	214.942	309.382
	- Macadam	74.694	107.513	154.752	222.746
	- Tanah	52.284	75.256	108.322	155.916
2	Cakupan Pelayanan Air Bersih (jiwa)	218.100	313.928	451.860	650.396
3	Rumah Layak Huni (rumah)	114.764	165.188	237.767	342.236
4	Cakupan Jaringan Listrik (SR)	79.801	114.864	165.332	237.975
MISI IV					
1	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	67,69% - 70%	70% - 73%	73% - 76%	76% - 80%
2	persentase jumlah Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Organisasi Pemuda dan Organisasi Masyarakat lainnya yang dibina	7,19% - 14%	14% - 19%	19% - 26%,	26 % - 33%.
3	rasio linmas inti per 10.000 penduduk	56,25%-61%	61% - 65%	65% - 68%	68% - 70%
MISI V					
1	Lahan kritis (Ha)	23.233,00	22.248,73	21.264,45	20.280,18
2	Lahan yang ditangani (Ha)	1.795	1.935	2.075	2.215
MISI VI					
1	PAD (Rp.000)	34.384.121	41.030.501	54.908.066	73.479.378
2	Realisasi Investasi				
	- PMA (Rp.000)	74.659.500	124.075.750	173.492.000	222.908.250
	- PMDN (Rp.000)	21.600.000	39.600.000	57.600.000	75.600.000
3	Jumlah PNS	10.196	10.696	11.446	11.946
4	Tingkat pendidikan formal aparatur				
	- D3/D4/S1	4.541	6.226	7.911	9.596
	- S2	250	350	450	550
	- S3	1	2	3	4

Sumber Data: RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025

6.2.2. Telaahan RTRW Kabupaten Pacitan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan mengatur struktur dan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Pacitan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Beberapa hal yang diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur dan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, yaitu bahwa:

1. Memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang, yang memuat:
- a. kebijakan dan strategi sistem perkotaan

b. kebijakan dan strategi sistem perdesaan

c. kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah
2. Memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yang memuat:
- a. kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung

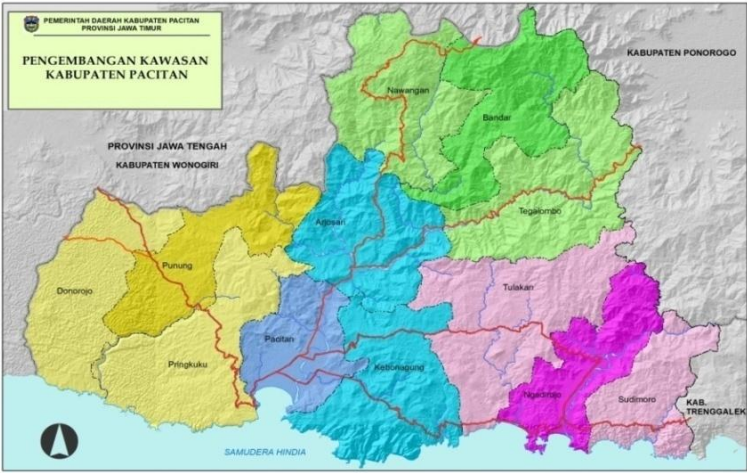
b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya

Berdasarkan hierarki dalam penataan ruang wilayah yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang diatas, maka pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi sebagai berikut:

- 1. Nawangan, Bandar dan Tegalombo
- 2. Sudimoro, Ngadirojo dan Tulakan
- 3. Pringkuku, Punung dan Donorojo
- 4. Arjosari, Pacitan dan Kebonagung

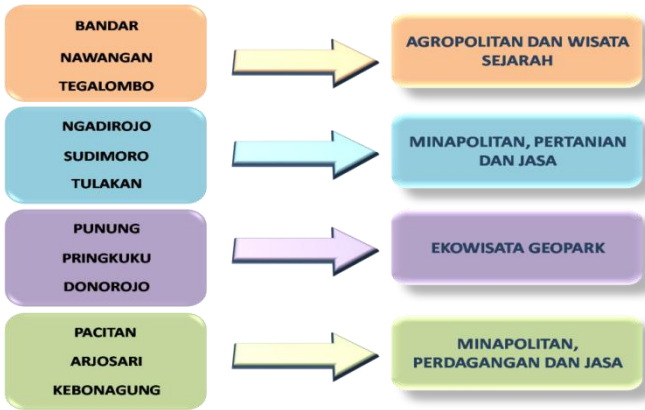
Gambar 4.2 menunjukkan pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan.

Gambar 4.2
Peta Pembagian Kawasan Pengembangan



Masing-masing kawasan pengembangan mempunyai karakteristik dan potensi unggulan yang berbeda-beda. Berikut ini disajikan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing wilayah sebagaimana Gambar 4.3 berikut ini:

Gambar 4.3
Karakteristik dan Potensi Unggulan Kawasan Pengembangan



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah agropolitan dan wisata sejarah. Agropolitan dikembangkan untuk komoditas unggulan antara lain perkebunan (kopi, cengkeh dan janggelan), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk, pisang dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung

aktifitas agropolitan juga dikembangkan industri berbasis pertanian antara lain industri sale pisang dan anyaman bambu. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan, khususnya agropolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan poros.

Gambar 4.4
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, pertanian dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan budidaya perikanan dan perikanan tangkap. Untuk komoditas pertanian unggulan antara lain perkebunan (melinjo, kelapa, kakao dan cengkeh), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (durian, sukun dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung aktifitas jasa juga dikembangkan industri kain batik tulis. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan khususnya minapolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur pelabuhan. Sedangkan sentra pertanian yang dibutuhkan adanya jaringan irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan kabupaten dan jalan poros.

Gambar 4.5
Pengembangan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah ekowisata geopark. Ekowisata dikembangkan untuk pelestarian dan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, baik obyek wisata pantai, goa, situs sejarah dan budaya guna mendukung Gunung Sewu sebagai jaringan geopark internasional. Untuk destinasi wisata unggulan antara lain pantai Klayar, Goa Gong, Pantai Srau, Pantai Watukarung, Sungai Maron, Pantai Banyu Tibo. Untuk mendukung aktifitas pariwisata juga dikembangkan industri gula merah dan batu mulia. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktifitas kawasan secara hierarki antara lain jalan nasional, jalan kabupaten dan jalan poros.

Gambar 4.6
Pembangunan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo



Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, perdagangan dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang didukung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Untuk mendukung aktifitas perdagangan dan jasa dikembangkan pasar daerah dan pusat pengembangan perekonomian kabupaten.

Gambar 4.7
Pembangunan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung



6.2.3. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 merupakan langkah yang dipakai untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang akan datang.

Untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Kabupaten Pacitan yang akan datang, terutama dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS menghasilkan beberapa isu strategis. Adapun isu strategis KLHS, sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan jalan dan angkutan;
2. Belum meratanya pelayanan air bersih;
3. Okupansi lahan kawasan lindung menjadi kawasan budidaya;
4. Adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan infrastruktur antar kecamatan di Kabupaten Pacitan;
5. Kualitas SDM dan kesejahteraan sosial masih rendah;
6. Minimnya upaya peningkatan mitigasi bencana;
7. Tingginya angka kemiskinan;
8. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien;
9. Penguatan daya saing ekonomi;
10. Penguatan ketahanan pangan daerah;
11. Belum terdapat sistem jaringan persampahan yang merata.

6.2.4. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah dalam perspektif otonomi daerah adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh daerah. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menghendaki agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian daerah mempunyai *diskresi* atau keleluasaan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah.

Kerjasama Antar Daerah harus didasarkan pada prinsip-prinsip saling menguntungkan dan berorientasi pada kepentingan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerjasama Antar Daerah dilakukan dengan prinsip-prinsip : a. efisiensi, b. efektivitas, c. sinergi, d. saling menguntungkan, e. kesepakatan bersama, f. itikad baik, g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, h. persamaan kedudukan, i. transparansi, j. keadilan, dan k. kepastian hukum.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah bahwa otonomi daerah harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Pelaksanaan kerja sama yang berdampak pada lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Demikian pula untuk menciptakan efisiensi dalam pengelolaan pelayanan publik,

daerah wajib mengelola secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan umum. Sedangkan istilah kerja sama daerah sesuai dengan pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Wali kota atau antara Bupati/Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota yang lain, dan atau Gubernur, Bupati/Wali Kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu kebijakan yang dilaksanakan adalah melakukan kerjasama dengan daerah lain yang diharapkan dapat mengurangi kerawanan sosial dan kesenjangan ekonomi daerah. Sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 kerjasama antar daerah yang masih dilaksanakan oleh Kabupaten Pacitan, antara lain kerjasama dengan kabupaten-kabupaten di daerah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) PAWONSARI (Pacitan, Wonogiri dan Wonosari Gunung Kidul), yang menghasilkan beberapa bidang yang dikerjasamakan yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perhubungan, bidang ketenagakerjaan, bidang kelautan, perikanan dan peternakan, bidang air bersih, bidang pekerjaan umum, bidang pariwisata, bidang ketertiban umum, bidang perkebunan, dan bidang kesejahteraan sosial. Untuk kerjasama antar daerah lintas perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) KARISMAPAWIROGO (Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Magetan, Pacitan, Ngawi, dan Ponorogo), juga telah melakukan kerjasama dalam bidang: pelayanan kesehatan, pariwisata, pengembangan penanaman modal, penegakan perda (POL PP), pendidikan, pemadam kebakaran, kesejahteraan sosial serta pembangunan infrastruktur jalan wilayah perbatasan KARISMAPAWIROGO. Selain itu ada juga kerjasama antar daerah yang masih berbentuk “Paguyuban GOLEKPAWON” (Ponorogo, Trenggalek, Pacitan dan Wonogiri). Dalam kerjasama lintas wilayah perbatasan baik wilayah PAWONSARI, KARISMAPAWIROGO maupun GOLEK PAWON tersebut masih terdapat kendala yaitu belum tertanganinya beberapa hal secara maksimal terutama bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan yang masih butuh perhatian dari semua pihak.

6.2.5. Isu Strategis Kabupaten Pacitan 2016-2021

Berdasarkan permasalahan-permasalahan serta analisis terhadap isu-isu strategis yang ada pada tingkat global, nasional, regional maupun lokal dengan pendekatan analisis keterkaitan, maka isu strategis yang harus ditangani dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Kabupaten Pacitan, yaitu:

1. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan;
2. Peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan;
3. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
4. Penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan;
5. Penguatan ketahanan pangan daerah;
6. Pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan;
7. Peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal;
8. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.